

APBD DAN STABILITAS EKONOMI DAERAH: STUDI PENGANGGURAN PANDEGLANG

Lukman Hakim¹, Laeli Nur Khanifah², Andi Iksan³, Mufthi Aminudin Haris⁴, Pasha Restu Brema G⁵, Zahra Aulia Mumtaz⁶

6670240016@student.untirta.ac.id¹, khanifah92@untirta.ac.id²,
6670240118@student.untirta.ac.id³, 6670240129@student.untirta.ac.id⁴,
6670240159@student.untirta.ac.id⁵, 6670240167@student.untirta.ac.id⁶

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui studi kasus pengangguran di Kabupaten Pandeglang. Isu ini penting karena TPT Pandeglang pada 2024 masih 8,09 persen, lebih tinggi daripada TPT Provinsi Banten sebesar 6,68 persen. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus menurut Creswell, melalui wawancara pada Bappeda, Disnakertrans, dan BPKD, serta telaah dokumen APBD, BPS, dan data terbuka daerah. Teori yang digunakan adalah fungsi APBD sebagai instrumen alokasi, distribusi, dan stabilisasi dengan indikator prioritas perencanaan, kualitas belanja produktif, kapasitas fiskal, penyerapan tenaga kerja, dan koordinasi lintas perangkat daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa APBD Pandeglang telah berperan melalui perencanaan berbasis data, program penempatan kerja, penguatan SDM, dan dorongan sektor unggulan. Namun, perannya belum optimal karena belanja operasi dominan, PAD rendah, dan evaluasi belanja belum sepenuhnya berbasis outcome ketenagakerjaan.

Kata Kunci : APBD, Stabilitas Ekonomi Daerah, Pengangguran, Pandeglang, Studi Kasus.

PENDAHULUAN

Stabilitas ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah menjaga agar aktivitas ekonomi, daya beli, dan kesempatan kerja tetap bergerak. Dalam konteks pemerintahan daerah, APBD menjadi instrumen penting karena melalui anggaran tersebut pemerintah menentukan prioritas pembangunan, membiayai layanan publik, dan melakukan intervensi terhadap masalah sosial-ekonomi. Jika alokasi APBD terlalu banyak terserap untuk belanja rutin, maka ruang untuk program produktif yang berdampak pada penciptaan kerja menjadi lebih terbatas. Sebaliknya, bila APBD diarahkan pada belanja yang memiliki efek pengganda, anggaran daerah dapat menjadi alat stabilisasi yang nyata bagi masyarakat (Pemerintah Republik Indonesia, 2019).

Kabupaten Pandeglang menjadi kasus yang menarik karena memiliki tekanan pengangguran yang masih menonjol di Provinsi Banten. Berdasarkan data BPS Provinsi Banten dari Sakernas Agustus 2024, TPT Pandeglang berada pada 8,09 persen, lebih tinggi dibandingkan angka Provinsi Banten sebesar 6,68 persen. Dalam tabel kabupaten/kota se-Banten, posisi Pandeglang berada di bawah Kabupaten Serang yang mencapai 9,18 persen, tetapi masih lebih tinggi daripada Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, dan Tangerang Selatan (Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2024).

Persoalan pengangguran di Pandeglang tidak dapat dibaca sebagai masalah tenaga kerja semata. Ia berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, struktur ekonomi lokal, akses pasar kerja formal, dan kapasitas fiskal daerah. Dalam wawancara dengan Bappeda, informan menyebut adanya gejala yang menarik: pertumbuhan ekonomi dapat meningkat, tetapi pengangguran juga berpotensi naik. Ia menyebutnya sebagai anomali yang perlu

dibaca dari sisi pertumbuhan penduduk, lulusan sekolah, migrasi kerja, dan perubahan karakter pasar kerja, termasuk munculnya pekerjaan nonformal dan digital yang tidak selalu tertangkap secara sempurna dalam pembacaan administrasi lokal (Wawancara Informan Bappeda, 2026).

Dari sisi fiskal, struktur APBD Kabupaten Pandeglang menunjukkan tantangan yang cukup jelas. Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2024 mencatat jumlah belanja daerah sebesar Rp2,772 triliun. Dari jumlah tersebut, belanja operasi mencapai Rp2,005 triliun atau sekitar 72,33 persen, sedangkan belanja modal sebesar Rp294,68 miliar atau sekitar 10,63 persen. Pada sisi pendapatan, PAD hanya sebesar Rp305,13 miliar, sementara pendapatan transfer mencapai Rp2,403 triliun. Angka ini memperlihatkan bahwa kemampuan fiskal Pandeglang masih sangat bergantung pada transfer dan belum memiliki ruang yang luas untuk ekspansi belanja produktif (Pemerintah Kabupaten Pandeglang, 2023).

Penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa hubungan APBD dan pengangguran tidak bersifat otomatis. Belanja daerah dapat menekan pengangguran apabila diarahkan pada sektor yang produktif dan mampu menggerakkan pasar kerja lokal, tetapi pengaruhnya bisa lemah bila belanja lebih banyak digunakan untuk kebutuhan administratif atau program yang dampaknya tidak langsung (Lengkey et al., 2023; Ramadani & Rochmatullah, 2024). Karena itu, penelitian ini tidak hanya bertanya apakah APBD berpengaruh terhadap pengangguran, melainkan bagaimana APBD dirancang, diarahkan, dan dipahami oleh perangkat daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi Pandeglang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: bagaimana peran APBD dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui upaya pengurangan pengangguran di Kabupaten Pandeglang? Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan peran APBD sebagai instrumen fiskal daerah, mengidentifikasi hambatan ruang fiskal dalam program penyerapan tenaga kerja, serta menyusun rekomendasi agar kebijakan anggaran Pandeglang lebih berpihak pada penciptaan kerja yang berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

APBD sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Daerah

APBD dalam penelitian ini dipahami sebagai instrumen kebijakan fiskal daerah, bukan hanya dokumen administratif tahunan. PP Nomor 12 Tahun 2019 menegaskan bahwa APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Tiga fungsi terakhir menjadi sangat relevan untuk membaca pengangguran: fungsi alokasi menyangkut penempatan anggaran pada sektor produktif, fungsi distribusi menyangkut keberpihakan kepada kelompok rentan dan pencari kerja, sedangkan fungsi stabilisasi menyangkut kemampuan anggaran menjaga aktivitas ekonomi daerah agar tidak jatuh terlalu dalam ketika terjadi tekanan ekonomi (Pemerintah Republik Indonesia, 2019).

Dalam konteks daerah, fungsi APBD tidak dapat dilepaskan dari kualitas belanja. Kualitas belanja berarti seberapa jauh belanja daerah menghasilkan manfaat yang terukur, bukan sekadar terserap secara administratif. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 menempatkan pengelolaan keuangan daerah sebagai rangkaian yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Dengan demikian, anggaran yang efektif harus dapat dilacak dari tahap perencanaan hingga outcome pembangunan, termasuk outcome ketenagakerjaan (Kementerian Dalam Negeri, 2020).

Untuk kebutuhan analisis, penelitian ini menurunkan teori fungsi APBD menjadi lima indikator: prioritas perencanaan berbasis data, alokasi belanja produktif, distribusi

manfaat kepada kelompok rentan dan pencari kerja, kapasitas fiskal daerah, serta capaian stabilisasi yang tercermin dari indikator pasar kerja dan ekonomi lokal. Indikator tersebut digunakan untuk menilai apakah APBD Pandeglang sudah bekerja sebagai instrumen stabilisasi ekonomi atau masih dominan berfungsi sebagai pembiayaan rutin birokrasi.

Tabel 1. Indikator Teori Fungsi APBD dalam Penelitian

Dimensi Teori	Indikator Analisis	Bukti yang Dicari	Makna dalam Penelitian
Perencanaan	Prioritas berbasis data	TPT, IPM, forum perencanaan, dokumen RKPD/APBD	APBD dinilai baik bila intervensi tidak hanya berdasarkan asumsi.
Alokasi	Belanja produktif	Belanja modal, pelatihan kerja, dukungan UMKM, sektor unggulan	Belanja diarahkan pada aktivitas yang membuka peluang kerja.
Distribusi	Keberpihakan kelompok rentan	Sasaran pemuda, lulusan SMK, pencari kerja, UMKM lokal	Manfaat anggaran tidak hanya dinikmati birokrasi atau kelompok tertentu.
Stabilisasi	Daya tahan ekonomi dan pasar kerja	TPT, penempatan kerja, daya beli, kegiatan ekonomi lokal	APBD membantu menahan pelemahan ekonomi dan kesempatan kerja.
Kapasitas fiskal	Kemandirian dan fleksibilitas anggaran	PAD, transfer, dominasi belanja operasi	Ruang fiskal menentukan besar kecilnya kemampuan intervensi.

Stabilitas Ekonomi Daerah dan Pengangguran

Stabilitas ekonomi daerah dalam artikel ini tidak dipersempit menjadi pertumbuhan ekonomi. Stabilitas dipahami sebagai keadaan ketika kegiatan ekonomi lokal relatif berjalan, pendapatan masyarakat tidak tertekan secara ekstrem, pelayanan dasar tetap berlangsung, dan kesempatan kerja tidak semakin menyempit. Pengangguran menjadi indikator kunci karena kenaikan pengangguran biasanya langsung berkaitan dengan penurunan pendapatan rumah tangga, daya beli, dan potensi kerentanan sosial (Kusuma & Anwar, 2023).

Pengangguran terbuka juga menunjukkan persoalan struktural. Jika pencari kerja bertambah tetapi dunia usaha lokal belum mampu menyerapnya, maka APBD perlu diarahkan bukan hanya pada pelatihan, tetapi juga pada penciptaan ekosistem ekonomi yang memberi ruang bagi penyerapan tenaga kerja. Penelitian Lengkey et al. menemukan bahwa realisasi belanja APBD berhubungan negatif dengan pengangguran di Kota Manado, tetapi makna penting dari temuan itu terletak pada arah dan efektivitas belanjanya (Lengkey et al., 2023).

Ramadani dan Rochmatullah menunjukkan bahwa pendapatan daerah dan transfer fiskal tidak selalu otomatis menurunkan pengangguran melalui belanja bantuan sosial. Temuan tersebut penting untuk kasus Pandeglang karena memperingatkan bahwa belanja yang bersifat konsumtif atau tidak terhubung dengan strategi pasar kerja bisa kurang efektif menekan TPT. Dengan kata lain, besarnya APBD tidak cukup; yang menentukan adalah struktur, sasaran, dan cara anggaran dikaitkan dengan kebutuhan ekonomi lokal (Ramadani & Rochmatullah, 2024).

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa pengangguran di Pandeglang merupakan masalah yang dipengaruhi oleh tiga lapis faktor. Lapis pertama adalah pasar kerja, terutama ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dengan lowongan yang tersedia. Lapis kedua adalah struktur ekonomi lokal, yaitu masih

terbatasnya hilirisasi dan industri pengolah yang mampu memberi nilai tambah di daerah. Lapis ketiga adalah kapasitas APBD, yaitu kemampuan anggaran daerah untuk mengalihkan sebagian belanja dari kebutuhan rutin menuju kegiatan yang berdampak pada pekerjaan.

Dengan kerangka tersebut, APBD ditempatkan sebagai variabel kebijakan yang bekerja melalui beberapa jalur: perencanaan berbasis data oleh Bappeda, implementasi program ketenagakerjaan oleh Disnakertrans, dan pengendalian kapasitas anggaran oleh BPKD. Ketiganya harus berjalan serempak. Jika perencanaan sudah berbasis data tetapi dukungan anggaran tidak cukup, program sulit berdampak. Jika anggaran tersedia tetapi desain program tidak sesuai kebutuhan pasar kerja, belanja juga tidak akan efektif. Karena itu, hubungan antara APBD dan pengangguran perlu dibaca sebagai relasi lintas perangkat daerah, bukan kerja satu dinas saja.

METODE PENELITIAN

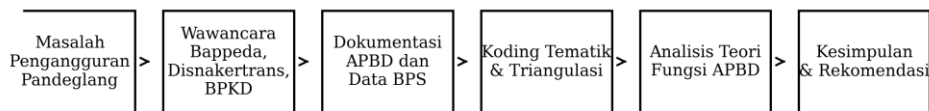
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada satu kasus yang terikat secara ruang dan konteks, yaitu peran APBD dalam menangani pengangguran di Kabupaten Pandeglang. Creswell dan Poth menjelaskan bahwa studi kasus digunakan untuk memahami sebuah kasus secara mendalam melalui pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dokumen, dan bahan audiovisual (Creswell & Poth, 2023).

Informan penelitian ditetapkan secara purposive karena dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan APBD. Informan pertama berasal dari Bappeda Kabupaten Pandeglang sebagai perangkat daerah yang berperan dalam perencanaan pembangunan. Informan kedua berasal dari Disnakertrans Kabupaten Pandeglang sebagai pelaksana urusan ketenagakerjaan, terutama penempatan kerja dan penguatan keterampilan. Informan ketiga berasal dari BPKD Kabupaten Pandeglang sebagai pengelola keuangan daerah yang memahami struktur APBD, PAD, transfer, dan batas ruang fiskal.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan telaah data sekunder. Wawancara digunakan untuk menggali cara pemerintah daerah memaknai pengangguran, menyusun prioritas anggaran, dan menilai efektivitas program. Dokumentasi dilakukan terhadap ringkasan APBD, data BPS, data terbuka Disnakertrans, serta dokumen kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah. Agar tidak terjadi pembacaan yang sepihak, temuan wawancara dibandingkan dengan data resmi dan teori yang digunakan.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kondensasi data dilakukan dengan memilah jawaban informan dan dokumen ke dalam tema perencanaan, alokasi anggaran, program ketenagakerjaan, kapasitas fiskal, dan hasil stabilisasi. Penyajian data dilakukan melalui matriks temuan dan tabel indikator. Kesimpulan diverifikasi menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik (Miles et al., 2020).

Catatan metodologis: transkrip wawancara yang tersedia paling lengkap berasal dari Bappeda, sehingga kutipan langsung yang ditampilkan dalam artikel ini terutama berasal dari informan Bappeda. Informasi tentang Disnakertrans dan BPKD digunakan dalam bentuk ringkasan tematik dan dukungan dokumen resmi; bagian tersebut tetap perlu disesuaikan kembali apabila transkrip lengkap dari kedua instansi tersedia.



Gambar 1. Alur Analisis Studi Kasus

Tabel 2. Informan dan Peran Data dalam Penelitian

Kode Informan	Instansi	Posisi dalam Analisis	Data Utama yang Digali
I1	Bappeda Kabupaten Pandeglang	Perencanaan pembangunan dan prioritas APBD	TPT sebagai indikator makro, forum perencanaan, sektor unggulan, program Gaspol/job fair, penguatan SDM.
I2	Disnakertrans Kabupaten Pandeglang	Implementasi program ketenagakerjaan	Pelatihan, penempatan pencari kerja, job fair, kerja sama perusahaan, kendala mismatch keterampilan.
I3	BPKD Kabupaten Pandeglang	Kapasitas dan struktur fiskal daerah	PAD, transfer, belanja operasi, belanja modal, fleksibilitas anggaran, evaluasi belanja berbasis outcome.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Data Pengangguran dan Posisi Pandeglang di Banten

Data Sakernas Agustus 2024 memperlihatkan bahwa pengangguran di Pandeglang masih menjadi persoalan penting. TPT Pandeglang tercatat 8,09 persen, berada di atas angka Provinsi Banten sebesar 6,68 persen. Angka tersebut menempatkan Pandeglang sebagai salah satu daerah dengan tekanan pengangguran tinggi di provinsi, meskipun lebih rendah daripada Kabupaten Serang yang mencapai 9,18 persen (Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2024).

Temuan ini menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi Pandeglang tidak dapat hanya dibaca dari pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan tidak diikuti perluasan kesempatan kerja, maka stabilitas yang terbentuk bersifat rapuh. Dalam wawancara, informan Bappeda menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Pandeglang dapat terlihat baik, tetapi kenaikan pengangguran tetap mungkin terjadi. Pernyataan ini penting karena memperlihatkan bahwa pemerintah daerah menyadari adanya jarak antara pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja (Wawancara Informan Bappeda, 2026).

Tabel 3. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024

Kabupaten/Kota	TPT 2024 (%)
Kabupaten Pandeglang	8,09
Kabupaten Lebak	6,23
Kabupaten Tangerang	6,06
Kabupaten Serang	9,18
Kota Tangerang	5,92
Kota Cilegon	6,08
Kota Serang	7,12
Kota Tangerang Selatan	5,09

Kabupaten/Kota	TPT 2024 (%)
Provinsi Banten	6,68

Sumber: BPS Provinsi Banten, Sakernas Agustus 2024, diolah peneliti.

Struktur APBD dan Keterbatasan Ruang Fiskal

Struktur APBD Pandeglang memperlihatkan tantangan klasik daerah dengan kapasitas fiskal terbatas. Pada 2024, PAD Pandeglang sebesar Rp305,13 miliar, sementara pendapatan transfer mencapai Rp2,403 triliun. Dengan total pendapatan Rp2,708 triliun, kontribusi PAD hanya sekitar 11,27 persen dan pendapatan transfer sekitar 88,73 persen. Komposisi ini menunjukkan bahwa kemampuan pembiayaan daerah masih sangat bergantung pada transfer, sehingga fleksibilitas untuk mendesain program lokal berskala besar menjadi terbatas (Pemerintah Kabupaten Pandeglang, 2023).

Pada sisi belanja, masalahnya tampak lebih jelas. Belanja operasi mencapai sekitar 72,33 persen dari total belanja, sedangkan belanja modal hanya sekitar 10,63 persen. Belanja operasi tentu tetap diperlukan untuk menjalankan birokrasi dan layanan dasar, tetapi dominasi yang terlalu besar dapat mengurangi daya dorong APBD terhadap aktivitas ekonomi produktif. Dalam teori fungsi APBD, kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi alokasi dan stabilisasi belum bekerja maksimal karena belanja produktif yang berpotensi menciptakan lapangan kerja masih relatif terbatas (Pemerintah Republik Indonesia, 2019; Pemerintah Kabupaten Pandeglang, 2023).

Kondisi ini tidak berdiri sendiri. Evaluasi Perubahan APBD Kabupaten Pandeglang tahun 2025 oleh BPKAD Provinsi Banten juga menunjukkan pola yang mirip: pendapatan daerah masih didominasi transfer sebesar 87,15 persen, PAD berkontribusi 12,85 persen, dan belanja operasi masih menjadi porsi terbesar. Artinya, persoalan ruang fiskal Pandeglang bukan hanya terjadi pada satu tahun anggaran, tetapi menjadi pola struktural yang perlu dijawab dengan reformulasi prioritas belanja dan penguatan PAD secara bertahap (BPKAD Provinsi Banten, 2025).

Tabel 4. Ringkasan Struktur APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2024

Komponen	Nilai (Rp)	Persentase	Implikasi Analitis
PAD	305.128.557.129	11,27% dari pendapatan	Kemandirian fiskal rendah; ruang inovasi anggaran terbatas.
Pendapatan Transfer	2.403.255.960.100	88,73% dari pendapatan	Ketergantungan tinggi pada pusat/provinsi.
Belanja Operasi	2.005.122.624.987	72,33% dari belanja	Belanja rutin dominan; efek penciptaan kerja tidak langsung.
Belanja Modal	294.683.623.085	10,63% dari belanja	Ruang pembangunan fisik dan efek pengganda relatif terbatas.
Belanja Bantuan Sosial	2.590.000.000	0,09% dari belanja	Perlu ketepatan sasaran agar berfungsi sebagai bantalan sosial.

Sumber: Ringkasan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2024, diolah peneliti.

Perencanaan Berbasis Data: Kesesuaian dengan Fungsi Perencanaan APBD

Temuan wawancara menunjukkan bahwa isu pengangguran telah masuk ke dalam kerangka indikator makro pembangunan daerah. Informan Bappeda menyebut bahwa penyusunan perencanaan memperhatikan indikator seperti laju pertumbuhan ekonomi, TPT, kemiskinan, inflasi, gini rasio, dan emisi gas rumah kaca. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pengangguran tidak dipandang sebagai isu sektoral Disnakertrans saja, melainkan sebagai indikator kinerja pembangunan daerah (Wawancara Informan Bappeda, 2026).

Salah satu pernyataan informan yang paling kuat adalah bahwa intervensi perencanaan harus dilakukan berbasis data. Informan menyampaikan, 'ketika kami menetapkan intervensi di perencanaan pembangunan, ya berdasarkan atau berbasis data',

lalu menambahkan bahwa jika program tidak berbasis data maka kemungkinan tepat sasarannya kecil. Kutipan ini sejalan dengan fungsi perencanaan APBD karena anggaran yang baik perlu dimulai dari diagnosis masalah yang benar (Wawancara Informan Bappeda, 2026).

Dari sudut teori, temuan ini sesuai dengan indikator perencanaan berbasis data. Namun, kesesuaian pada tahap perencanaan belum otomatis berarti efektif pada tahap hasil. APBD dapat dirancang berdasarkan data, tetapi outcome-nya tetap bergantung pada ketepatan program, alokasi anggaran, kualitas pelaksanaan, dan dukungan dunia usaha. Dengan demikian, perencanaan Pandeglang sudah bergerak ke arah yang benar, tetapi masih perlu diperkuat dengan mekanisme evaluasi yang menghubungkan anggaran, kegiatan, output, dan serapan tenaga kerja.

Program Ketenagakerjaan: Dari Job Matching ke Penguatan SDM

Bappeda menyebut adanya program unggulan yang diarahkan untuk mengurangi pengangguran, salah satunya melalui fasilitasi Disnakertrans dalam bentuk job fair atau job matching. Informan menyebut bahwa program tersebut bertujuan memberi peluang bagi angkatan kerja untuk masuk ke dunia kerja dan disertai penguatan SDM agar pencari kerja mampu bersaing. Pernyataan ini menunjukkan bahwa strategi daerah tidak hanya menempatkan pencari kerja pada lowongan, tetapi juga mencoba memperbaiki daya saing tenaga kerja (Wawancara Informan Bappeda, 2026).

Secara teoritis, program job fair dan penempatan kerja berhubungan dengan fungsi alokasi APBD karena anggaran diarahkan pada aktivitas yang mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan. Data terbuka Pandeglang juga menunjukkan bahwa Disnakertrans menyediakan dataset tentang pengangguran terbuka, TPAK, pencari kerja terdaftar, pencari kerja menurut pendidikan, dan pencari kerja yang ditempatkan. Keberadaan dataset ini penting karena dapat menjadi dasar evaluasi apakah kegiatan penempatan kerja benar-benar mengurangi kesenjangan antara pencari kerja dan kebutuhan industri (Open Data Kabupaten Pandeglang, 2025).

Meski demikian, job fair tidak cukup bila tidak diikuti peningkatan kualitas pelatihan, sertifikasi, dan kerja sama yang lebih stabil dengan dunia industri. Banyak pencari kerja muda, terutama lulusan SMK, dipersiapkan untuk bekerja, tetapi mereka tetap menghadapi persaingan dari luar daerah dan standar industri yang terus berubah. Dalam konteks ini, APBD seharusnya tidak hanya membiayai kegiatan seremonial penempatan kerja, tetapi juga membiayai rantai kebijakan yang lebih lengkap: pemetaan kebutuhan industri, pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi, magang, penempatan, dan pemantauan pascapenempatan.

Temuan ini sebagian sesuai dengan teori fungsi alokasi dan distribusi APBD. Sesuai karena program diarahkan pada kelompok pencari kerja dan dunia usaha. Belum sepenuhnya sesuai karena indikator hasilnya belum cukup terlihat dalam bentuk penurunan TPT yang konsisten dan terhubung langsung dengan program APBD. Dengan demikian, program ketenagakerjaan perlu diperlakukan sebagai investasi SDM, bukan sekadar kegiatan tahunan.

Sektor Unggulan dan Hilirisasi: Syarat Agar APBD Berdampak pada Lapangan Kerja

Informan Bappeda menegaskan bahwa sektor yang perlu dioptimalkan di Pandeglang adalah pariwisata, perikanan, dan pertanian. Selain itu, pemerintah daerah mendorong hilirisasi dan industri pengolahan yang ramah lingkungan, terutama berbasis agro. Alasan yang dikemukakan cukup rasional: banyak hasil alam Pandeglang masih keluar dalam bentuk bahan mentah, sehingga nilai tambah dan peluang kerja justru lebih banyak dinikmati daerah lain (Wawancara Informan Bappeda, 2026).

Kutipan informan memperlihatkan logika pembangunan yang penting: ketika kelapa, padi, atau hasil alam lain hanya dijual mentah, pengaruh ekonominya menjadi kurang optimal. Sebaliknya, apabila didorong ke industri pengolahan, proses produksi akan menciptakan nilai tambah, menyerap tenaga kerja, dan menumbuhkan kluster UMKM di sekitar pusat pertumbuhan baru. Ini menunjukkan bahwa pengurangan pengangguran tidak cukup dilakukan melalui pelatihan kerja, tetapi harus dihubungkan dengan strategi transformasi ekonomi lokal (Wawancara Informan Bappeda, 2026).

Dalam perspektif fungsi stabilisasi APBD, belanja pemerintah daerah akan lebih kuat apabila diarahkan pada sektor yang memiliki efek pengganda. Belanja infrastruktur pendukung pertanian, perikanan, pariwisata, logistik, dan kawasan industri agro dapat memperbaiki konektivitas ekonomi sekaligus menciptakan permintaan tenaga kerja. Namun, strategi ini membutuhkan konsistensi lintas perangkat daerah: Bappeda mengarahkan prioritas, BPKD memastikan dukungan anggaran, Disnakertrans menyiapkan tenaga kerja, dan dinas teknis lain membangun ekosistem usaha.

Temuan ini sesuai dengan teori alokasi produktif APBD, tetapi masih menghadapi hambatan kapasitas fiskal. Belanja modal yang hanya sekitar 10,63 persen dari total belanja 2024 membuat daya dorong infrastruktur dan pusat pertumbuhan baru menjadi terbatas. Dengan demikian, arah kebijakannya tepat, tetapi skalanya belum cukup besar untuk menjadi mesin penyerapan tenaga kerja yang kuat.

Peran BPKD: Menjaga Disiplin Anggaran sekaligus Membuka Ruang Belanja Produktif

Dalam penelitian ini, BPKD diposisikan sebagai aktor penting karena pengurangan pengangguran tidak dapat dilepaskan dari struktur fiskal. Bappeda dapat merancang prioritas, Disnakertrans dapat mengusulkan program, tetapi BPKD memegang peran dalam memastikan kemampuan anggaran, kesesuaian regulasi, kas daerah, dan disiplin belanja. Karena itu, BPKD bukan sekadar unit teknis keuangan, melainkan penjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan batas kemampuan fiskal daerah.

Data APBD 2024 menunjukkan bahwa tantangan utama BPKD adalah menyeimbangkan kebutuhan belanja wajib dan ruang belanja produktif. Belanja pegawai mencapai Rp1,273 triliun atau sekitar 45,95 persen dari total belanja. Di sisi lain, belanja modal dan bantuan sosial relatif kecil. Kondisi ini membuat APBD lebih mudah berfungsi sebagai penjaga layanan rutin daripada mesin pencipta peluang kerja baru (Pemerintah Kabupaten Pandeglang, 2023).

Dalam teori kualitas belanja, keterbatasan fiskal tidak harus selalu dijawab dengan menambah anggaran, tetapi dengan memperbaiki prioritas. BPKD dapat mendorong perangkat daerah menggunakan pendekatan tagging belanja ketenagakerjaan, yaitu menandai program yang memiliki kontribusi langsung atau tidak langsung terhadap penyerapan kerja. Dengan cara ini, pemerintah daerah bisa mengetahui program mana yang benar-benar berkontribusi terhadap penciptaan kerja, bukan hanya program yang secara administratif terserap.

Dari perspektif stabilisasi, peran BPKD akan semakin kuat apabila evaluasi belanja tidak berhenti pada realisasi anggaran, tetapi naik ke pertanyaan outcome: berapa pencari kerja yang ditempatkan, berapa peserta pelatihan yang tersertifikasi, berapa UMKM yang bertahan, dan berapa proyek belanja modal yang menciptakan peluang kerja lokal. Inilah titik penting yang perlu diperkuat agar APBD tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga relevan secara sosial-ekonomi.

Matriks Kesesuaian Temuan dengan Teori

Tabel 5. Kesesuaian Temuan Lapangan dengan Indikator Teori

Indikator Teori	Temuan Utama	Kesesuaian	Catatan Kritis
Perencanaan berbasis data	Bappeda menggunakan TPT dan indikator makro sebagai dasar perencanaan serta membuka ruang forum konsultasi publik.	Sesuai	Perlu penguatan evaluasi outcome agar data tidak berhenti pada tahap perencanaan.
Alokasi belanja produktif	Ada program job fair, penguatan SDM, dan dorongan sektor unggulan, tetapi belanja modal masih 10,63%.	Sebagian sesuai	Arah kebijakan tepat, tetapi porsi belanja produktif masih terbatas.
Distribusi manfaat	Sasaran diarahkan kepada pencari kerja muda, lulusan SMK, dan UMKM/klaster lokal.	Sebagian sesuai	Butuh data pascapenempatan dan pemerataan akses antarwilayah.
Stabilisasi ekonomi	TPT 2024 masih 8,09%, di atas Banten 6,68%; APBD belum cukup kuat menekan tekanan pasar kerja.	Belum optimal	Pertumbuhan ekonomi perlu dihubungkan dengan serapan kerja lokal.
Kapasitas fiskal	PAD hanya 11,27% dari pendapatan; transfer mendominasi 88,73%; belanja operasi 72,33%.	Tidak sepenuhnya sesuai	Ketergantungan fiskal membatasi fleksibilitas belanja pencipta kerja.

Pembahasan Kritis: APBD sebagai Enabler, Bukan Satu-satunya Jawaban

Berdasarkan matriks di atas, APBD Pandeglang sudah memiliki arah yang relevan dengan teori fungsi APBD. Perencanaan sudah menggunakan indikator makro, program ketenagakerjaan sudah diarahkan pada job matching dan penguatan SDM, serta sektor unggulan sudah mulai dibaca melalui kebutuhan hilirisasi. Namun, kesesuaian tersebut masih bersifat parsial karena keterbatasan ruang fiskal dan dominasi belanja operasi membuat daya intervensi APBD tidak terlalu besar.

Kontra-argumen yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa pengangguran tidak sepenuhnya dapat diselesaikan oleh APBD. Banyak faktor berada di luar kendali langsung pemerintah daerah, seperti keputusan investasi swasta, mobilitas tenaga kerja, karakter industri di luar Pandeglang, dan perubahan teknologi. Karena itu, menuntut APBD menurunkan TPT secara langsung bisa menjadi ekspektasi yang terlalu sederhana. APBD lebih tepat dipahami sebagai enabler, yaitu pengungkit yang menciptakan kondisi agar pasar kerja dapat berkembang.

Namun, argumen tersebut tidak berarti pemerintah daerah boleh pasif. Justru karena APBD terbatas, pilihan anggaran harus semakin tajam. Program yang tidak memiliki hubungan dengan penciptaan nilai tambah lokal perlu dievaluasi. Belanja modal perlu diprioritaskan pada infrastruktur yang membuka akses ekonomi, bukan hanya proyek fisik yang tidak berhubungan dengan produktivitas. Pelatihan kerja perlu berbasis kebutuhan industri, bukan hanya berdasarkan daftar kegiatan rutin. Bantuan sosial perlu disambungkan dengan perlindungan daya beli dan pemberdayaan, bukan berhenti sebagai transfer sesaat.

Dengan demikian, peran APBD dalam menjaga stabilitas ekonomi Pandeglang berada pada posisi penting tetapi belum optimal. APBD sudah digunakan sebagai bahasa perencanaan dan pembiayaan program, tetapi belum sepenuhnya menjadi instrumen fiskal

yang terukur dampaknya terhadap pasar kerja. Titik pembenahannya bukan hanya menambah anggaran, melainkan memperbaiki kualitas belanja, indikator outcome, dan koordinasi lintas perangkat daerah.

Rekomendasi Kebijakan

Pertama, Pemerintah Kabupaten Pandeglang perlu membuat penandaan atau tagging belanja yang berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja. Setiap program yang diklaim mendukung pengurangan pengangguran harus memiliki indikator output dan outcome, misalnya jumlah peserta tersertifikasi, jumlah peserta ditempatkan, jumlah usaha baru, atau jumlah tenaga kerja lokal yang terserap.

Kedua, belanja modal perlu diarahkan pada infrastruktur ekonomi yang mendukung sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri pengolahan berbasis agro. Jalan produksi, akses wisata, irigasi, fasilitas pengolahan, dan konektivitas logistik dapat menjadi prioritas karena lebih dekat dengan penciptaan nilai tambah lokal.

Ketiga, Disnakertrans perlu memperkuat program penempatan kerja dari sekadar job fair menjadi sistem pasar kerja daerah. Sistem tersebut sebaiknya memuat data pencari kerja, kompetensi, kebutuhan industri, pelatihan, sertifikasi, magang, penempatan, dan pemantauan pascapenempatan.

Keempat, Bappeda, Disnakertrans, BPKD, dinas teknis, dan pelaku usaha perlu memiliki forum koordinasi khusus pengurangan pengangguran. Forum ini tidak cukup bersifat musyawarah umum, tetapi harus menghasilkan daftar kebutuhan tenaga kerja, sektor prioritas, dan program APBD yang saling terhubung.

Kelima, penguatan PAD perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak membebani pelaku usaha kecil. Peningkatan PAD sebaiknya didorong melalui perluasan basis ekonomi, digitalisasi retribusi, perbaikan layanan, dan penguatan aset daerah, bukan melalui pungutan yang melemahkan aktivitas usaha lokal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa APBD Kabupaten Pandeglang berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui fungsi perencanaan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi, tetapi perannya belum optimal dalam menekan pengangguran. Pada tingkat perencanaan, Bappeda sudah menempatkan TPT sebagai indikator penting dan menyusun intervensi berbasis data. Pada tingkat pelaksanaan, Disnakertrans menjadi aktor penting melalui job fair, penempatan kerja, dan penguatan SDM. Pada tingkat fiskal, BPKD berperan menjaga disiplin anggaran dan memastikan program berjalan dalam batas kemampuan keuangan daerah.

Kendala utama terletak pada struktur APBD yang masih didominasi belanja operasi, rendahnya PAD, tingginya ketergantungan pada transfer, dan belum kuatnya pengukuran outcome ketenagakerjaan. Dengan TPT 2024 sebesar 8,09 persen, Pandeglang masih membutuhkan strategi APBD yang lebih tajam, terutama pada belanja produktif yang terkait langsung dengan sektor unggulan dan hilirisasi ekonomi lokal.

Secara teoritis, temuan penelitian memperkuat pandangan bahwa APBD tidak otomatis menurunkan pengangguran. APBD baru bekerja sebagai instrumen stabilisasi apabila alokasinya produktif, sasarannya tepat, implementasinya terkoordinasi, dan evaluasinya tidak berhenti pada serapan anggaran. Secara praktis, Pemerintah Kabupaten Pandeglang perlu mengembangkan penganggaran berbasis outcome ketenagakerjaan, memperkuat integrasi Bappeda-Disnakertrans-BPKD, serta mendorong belanja yang menciptakan nilai tambah dan pekerjaan lokal.

Keterbatasan penelitian ini adalah belum tersedianya transkrip lengkap dari seluruh informan secara setara, sehingga kutipan langsung paling kuat berasal dari Bappeda.

Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan pelaku usaha, alumni pelatihan, pencari kerja, dan UMKM agar hubungan antara APBD, program ketenagakerjaan, dan perubahan kondisi ekonomi rumah tangga dapat dibaca secara lebih utuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang. (2025). Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pandeglang 2025. Pandeglang: BPS Kabupaten Pandeglang.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2024). Keadaan ketenagakerjaan Provinsi Banten Agustus 2024. Serang: BPS Provinsi Banten.
- BPKAD Provinsi Banten. (2025). BPKAD Provinsi Banten lakukan evaluasi Perubahan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2025. Serang: BPKAD Provinsi Banten.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2023). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kusuma, A. F., & Anwar, A. (2023). Analisis ketergantungan fiskal daerah dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*, 2(2), 223-233.
- Lengkey, M., Lopian, A. L. C. P., & Mandei, D. (2023). Analisis pengaruh tingkat inflasi dan realisasi belanja APBD terhadap tingkat pengangguran di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(4).
- Marlina, C., & Akbar, G. G. (2023). Analisis kinerja APBD provinsi di Indonesia: Sebuah studi mengenai rasio keuangan, korelasi metrik dan klusterisasi kinerja. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 10(3), 615-636.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Open Data Kabupaten Pandeglang. (2025). Dataset Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang tahun data 2024. Pandeglang: Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
- Pemerintah Kabupaten Pandeglang. (2023). Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan Tahun Anggaran 2024. Pandeglang: Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Ramadani, H. A., & Rochmatullah, M. R. (2024). Analisis dampak pendapatan daerah terhadap kemiskinan dan pengangguran dengan belanja bantuan sosial sebagai pemediasi. *Jurnal Akuntansi*, 20(1).
- Wawancara Informan Bappeda Kabupaten Pandeglang. (2026). Transkrip wawancara tentang peran APBD dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah: Studi kasus pengangguran di Pandeglang. Dokumen tidak dipublikasikan.